

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308 Fax (031) 3930615 **G R E S I K**

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NO 01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik.

Mengingat.

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
 Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Organisasi;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- 16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NO 01 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN

BAB III : I SU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN

SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN: MATRIK RENCANA STRATEGIS

Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator

Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik.
FORMULASI INDIKATOR KINERJA

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 27 Desember 2023

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

LAMPIRAN

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

		Hal
BAB I	: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan	1 2 4 4
BAB II	 GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 	6 10 12 13
BAB III	: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	15
	B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
	C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan	23 28
	dan Pembangunan (BPKP) F. Penentuan Isu-Isu Strategis	30 32
BAB IV	: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi B. Strategi dan Kebijakan	34 37
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
BAR VII	: PENUTUP	48

LAMPIRAN: MATRIK RENCANA STRATEGIS

Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat

Lampiran: Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik

Nomor : 24 Tahun 2023 Tanggal : 27 Desember 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Derah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka

menengah Inspektorat Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Gresik. Rangkaian proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rangkaian kegiatan penyusunan Renstra diawali dengan penyusunan tim penyusun Renstra yang dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Gresik dan kemudian tim ini melakukan rangkaian kegiatan penyusunan diantaranya pengumpulan data, melakukan focus group discussion dan melakukan telaah dokumen terkait yang diperlukan diantaranya dokumen dari instansi vertikal, Renstra BPKP dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 01 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat daerah kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026:
- 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, adalah :

- 1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat ;
- Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, adalah mewujudkan kesatuan komitmen bersama terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipasif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
- 2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD.
- 3. Pada bab III berisi uraian atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Derah dan Wakil kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis.
- 4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2026.
- 5. Pada bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
- 6. Pada bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 2026.
- 7. Pada bab VII berisi Penutup termasuk kaidah transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

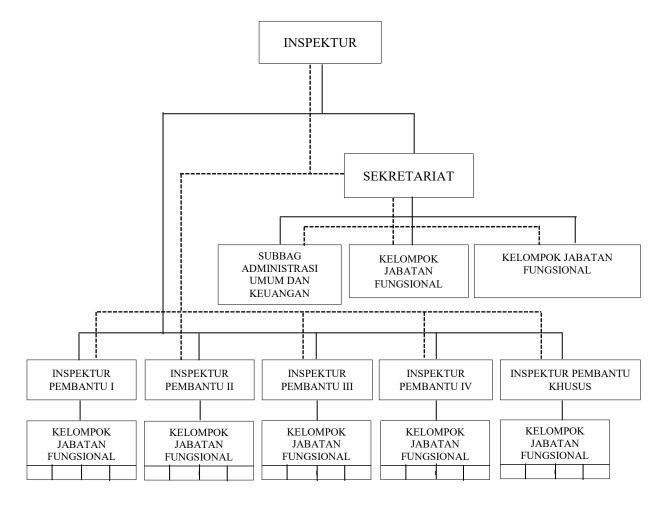
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik. Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 adalah terdiri atas:

- 1. Inspektur;
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Inspektur Pembantu I
- 4. Inspektur Pembantu II
- 5. Inspektur Pembantu III
- 6. Inspektur Pembantu IV
- 7. Inspektur Pembantu Khusus.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

(PERDA KAB. GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2022)



Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas yaitu membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dan menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

- 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

a. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan . Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
- 2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- 3. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
- 4. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- 5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 6. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kabupaten Gresik membawahi:

- Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa. Sedangkan Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- 2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- 5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- 6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- 8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- 9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- 10. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- 11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu:

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- a. Golongan IV, sebanyak 15 orang;
- b Golongan III, sebanyak 21 orang;
- c. Golongan II, sebanyak 11 orang;

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari:

- a. Eselon II, sebanyak 1 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 6 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 1 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 39 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 10 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 25 orang;
- c. D III, sebanyak 8 orang;
- d. SMA, sebanyak 4 orang;
- e. SMP, sebanyak 0 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat yang bertindak sebagai tenaga pemeriksa terdiri dari :

- a. Tenaga pemeriksa bersertifikasi JFA, sebanyak 22 orang;
- b. Tenaga pemeriksa belum sertifikasi JFA, sebanyak 7 orang.

2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Gresik menempati ruangan/gedung Kantor Bupati Gresik Lantai III, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Kendaraan roda 4 (empat) 15 unit
 - 7 unit dalam kondisi baik.
 - 8 unit dalam kondisi kurang baik.
- * Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit
 - 6 unit dalam kondisi baik.
 - 5 unit dalam kondisi kurang baik.

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Gresik didukung oleh fasilitas :

- Komputer PC sebanyak 50 unit.
 - 16 unit dalam kondisi spek lama.
 - 32 unit dalam kondisi spek baru.
- Note Book/ Laptop 6 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu SKPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2016-2020 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2021-2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 2.1. berikut:

No.		Indikator	Tahun				
NO.		Hidikatoi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Level Kapabilitas APIP		1	1	2	2	2
2		TL Audit internal	100%	100%	80%	100%	100%
3	Persentase	TL Audit eksternal	81,02%	79,94%	80%	97%	74,57%
4		TL Pengaduan masyarakat	100%	100%	80%	100%	100%
5	Nilai SAKIP		60,08	71,67	80,12	80,69	81,65
6	Level Maturitas SPIP		1	1	2	3	3

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :
 - a. Kekuatan, meliputi:
 - Adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 - Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;
 - 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;
 - 6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.
 - b. Kelemahan, meliputi:
 - 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
 - 2) Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan;
 - 3) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;

- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas.
- 5) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.
- 2. Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :
 - a. Peluang, meliputi:
 - Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
 - 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.
 - b. Ancaman, meliputi:
 - 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja;
 - 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada SKPD;
 - 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Gresik serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya:

1. Pengawasan yang Profesional.

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersedian sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 15 kendaraan dinas roda 7 (tujuh) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik, yang dilakukan

4 Inspektur Pembantu Wilayah serta Inspektur Pembantu Khusus dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Tingkat Pertama, Muda dan Madya, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Diklat pengawasan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat disebutkan "Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan:

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap desa;

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : "Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

4. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum seluruhnya ditindaklanjuti dan Survey Penilaian Integritas (SPI) dimana nilai indeks nya yang masih rendah serta pengawasan P3DN yang masih dibawah target. Inspektorat Kabupaten Gresik berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

Adapun identifikasi permasalahan Inspektorat Kabupaten Gresik pada beberapa aspek kajian disajikan sebagai berikut :

			Faktor yang Mempengaruhi			
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenan gan SKPD)	Permasalaha n Pelayanan PD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan pengawasan	Sarana mobilitas yang terdiri dari 15 kendaraan roda 4, 8 diantaranya kurang memadai dan layak.	Umur ekonomis kendaraan dinas adalah 7 Tahun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah.	Belum ada perencanaan yang baik untuk memasukkan usulan pengadaan kendaraan dinas yang memadai dan layak pakai untuk operasional lapangan.	Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional lapangan.	Luasnya cakupan obyek pemeriksaan berdasarkan jumlah SKPD sebanyak 56. Sedangkan secara luas wilayah terdiri 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.	
Ketersediaan APIP yang professional.	Jumlah tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikasi bidang pengawasan (JFA) sebanyak 22 orang.	Permenpan No. 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Pasal 27: Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/K ota paling banyak 48 orang.	Arah kebijakan internal untuk penetapan status aparatur pengawasan sebagai fungsional atau struktural.	Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mendorong wajibnya jabatan fungsional untuk aparatur pengawasan.	Kesiapan perangkat yang menyertai dalam hal pembentukan jabatan fungsional untuk aparatur pengawasan .	

	C	Standar yang	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalaha	
Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Digunakan	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenang an SKPD)	n Pelayanan PD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja.	Luasnya cakupan obyek pemeriksaan dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas Keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Luas cakupan berdasarkan jumlah SKPD sebanyak 56. Sedangkan secara luas wilayah terdiri 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.	PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Pemerintah Daerah.	Keterbatasan jumlah aparatur pengawasan yang terkait Pengawasan Keuangan dan kinerja.	Keterbatasa n kuota perekrutan formasi calon APIP di Inspektorat pada kegiatan tes penerimaan CPNS Kabupaten Gresik.	Tugas dan fungsi Inspektorat dalam rangka mewujudkan penyelenggar aan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya kepemerintah an yang baik (good governance) akan tetapi dengan tambahan tugas —tugas mandatory dari pusat yang tidak sedikit.	
Optimalisasi Implementasi SPIP Terintegrasi.	Sosialisasi/ Bimtek yang kurang berkesinambu ngan serta Bimtek SPIP Terintegrasi hanya dilakukan 1 kali dalam setahun.	PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Sulitnya Perencanaan yang sistematis untuk mendorong Implementasi SPIP Terintegrasi yang berkesinambu ngan .	Kurangnya pemahaman tentang implementas i SPIP Terintegrasi yang dimiliki oleh Satgas SPIP masing- masing SKPD.	Implementasi SPIP yang terintegrasi belum optimal menyebabka n pengendalian atas kegiatan yang dilakukan SKPD menjadi lemah.	

Penyelenggar aan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Sudah tahap pencanangan komitmen pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM dan Pengusulan Perangkat daerahnya.	Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna n Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah	Keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaann ya.	Minimnya pemahaman tentang Zona Integritas dan sedikitnya pengusulan Perangkat Daerah terhadap Predikat ZI WBK WBBM.	Sosialisasi yang diikuti dengan pendampinga n dalam upaya mewujudkan Zona Integritas pada SKPD yang diusulkan belum berkesinambu ngan.
---	---	---	--	--	--

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah:

"MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH".

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik

Secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung misi Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk Tercapainya sasaran masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, adil, aman, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing yaitu:

Misi Ke-1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

dengan **Sasaran ke 1**: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Adapun identifikasi permasalahan pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Gresik terkait dengan telaahan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

	: Terwujudnya Gresik baru ya andaskan akhlakul karimah	ang lebih mandiri, sejahtera, bo	erdaya saing dan b	erkemajuan
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan	Fa	ktor
110	KDH dan Wakil KDH terpilih	SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi: Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntable, serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan Tekonologi informasi. Strategi: Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui open dan smart government	Belum optimalnya peran pembinaan dan pengawasan dengan kondisi luas cakupan obyek pemeriksaan terdiri dari :	Minimnya jumlah aparatur pengawasan. Minimnya kesempatan pelaksanaan Diklat fungsional bidang pengawasn.	Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mendorong wajibnya jabatan fungsional untuk aparatur pengawasan sehingga memungkinkan penambahan jumlah aparatur pengawasan yang lebih banyak. Peraturan baru tentang Perubahan struktural menjadi fungsional aparatur pengawasan mendorong ketersediaan aparatur pengawasan dalam jumlah banyak sehingga dimungkinkan untuk dapatnya mengadakan diklat bidang pengawasan secara mandiri.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

C.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 Km2, terdiri dari 996,14 Km2 luas wilayah daratan ditambah sekitar 196,11 Km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.000 mm per tahun sehingga hampir setiap tahun mengalami musim kering yang panjang.

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur antara lain adalah belum seluruhnya wilayah pedesaan di Kabupaten Gresik terjangkau program jalan poros desa, tidak seimbangnya volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, serta belum terealisasikannya pembangunan Bendung Gerak Sembayat Untuk Pulau Bawean, belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana listrik, belum terwujudnya penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Gresik dengan Pulau Bawean, serta belum optimalnya pembangunan jalan lingkar Bawean serta belum adanya jalan tembus antara Bagian Timur dan Barat Pulau Bawean.

Untuk itu perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pembangunan infrastruktur di masa mendatang agar bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada, yaitu :

- a. Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar-wilayah, ditandai oleh tingkat *primacy* Kota Gresik yang makin tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Gejala *urban primacy* di Kota Gresik ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung *convergen* mengarah ke Kota Gresik dari wilayah sekitarnya. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup lokal akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.
- b. Perkembangan beberapa wilayah kepulauan (Bawean) masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan wilayah daratan Kabupaten Gresik.
- c. Perkembangan beberapa wilayah selatan Kabupaten Gresik juga lebih terlambat dibandingkan perkembangan wilayah utara Kabupaten Gresik.
- d. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan dengan mekanisme pasar.

Selain beberapa temuan pada pengembangan wilayah tersebut, terdapat beberapa fenomena eksternal maupun internal yang muncul di Kabupaten Gresik, antara lain:

- a. Fenomena globalisasi, di mana sistem mekanisme pasar akan jauh lebih kuat dibandingkan mekanisme lainnya (birokrasi). Globalisasi ini pun akan menyebabkan terjadinya fenomena *borderless region*.
- b. Fenomena otonomi daerah, di mana adanya fungsi-fungsi pengelolaan di pusat yang didesentralisasi pada kewenangan daerah, sehingga menyebabkan semakin besarnya kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan wilayahnya.
- c. Adanya perubahan pada pemaknaan aglomerasi. Perkembangan konsep aglomerasi ini berubah dalam penentuan investasi dari faktor keuntungan penghematan ekonomi akibat aglomerasi menjadi analisis biaya transaksi.
- d. Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah yang memiliki

ketersediaan infrastruktur yang cukup (relatif berada di wilayah utara), dan yang kurang cukup (relatif berada di wilayah selatan), serta sangat kurang (di wilayah Pulau Bawean).

Dari uraian di atas dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, hal tersebut sedikit berdampak dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

C.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menghasilkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi konflik masih sering muncul di Kabupaten Gresik khususnya sebagai akibat/dampak dari aktivitas pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik. Beberapa dampak yang saat ini banyak menjadi perdebatan adalah tentang degradasi kualitas lingkungan hidup yang juga berpengaruh pada konflik sosial yang kompleks. Konflik tersebut terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat baik pada tingkat local dan nasional. Agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak membawa dampak yang lebih merugikan untuk lingkungan, berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penjaminan dampak lingkungan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara praktis, penyusunan KLHS diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KHLS ini merupakan bagian terintegrasi dari proses penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) di setiap level pemerintahan. Dalam konteks rencana pembangunan, pemerintah (baik daerah maupun pusat) wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam kajian perencanaan pembangunan yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan/atau meningkatkan risiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dapat dimitigasi sebelumnya dan diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyatakan dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup. Keterkaitan peran inspektorat terhadap kajian lingkungan hidup strategis dapat dijabarkan di tabel bawah ini.

NO	Isu Prioritas Hasil Penjaringan	Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting	Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB	Peran Inspektorat
1	Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran.	Jasa penyediaan air cukup baik.	Kualitas Air dan sanitasi.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan nya terkait kualitas air dan sanitasi (yang ditujukan ke inspektorat) pada PDAM BUMD Pemkab.
2	Penurunan kualitas airpermukaan dan udara terkait dengan daya tampungnya terhadap bahan pencemar.	Daya tampung air dan udara sudah memasuki ambang batas.	Limbah dan persampahan.	Mereview dana bantuan/hibah dari pusat terkait lingkungan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan tepat 3E (Efisien, efektif dan ekonomis).
3	Sebaran Kemiskinan dan Penurunan Kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19.	Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa.	Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri.	Mereview HPS 10 Proyek strategis (Kegiatan PBJ infrastruktur) dengan nilai paket tertinggi di Pemkab.
4	Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marginal.		Pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender.	Monev PPRG dan ARG pada Dinas yang terkait.
5	Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan.			
6	Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan.			
7	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana prasarana permukiman perkotaan.			

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat kabupaten Gresik yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS:

Faktor	Internal	STRENGTHS:	WEAKNESSES :
		Adanya Peraturan Daerah	
		Kabupaten Gresik Nomor	kompetensi sebagian
		15 Tahun 2020 tentang	Sumber Daya Manusia
		Pembentukan Perangkat	(Aparat Pengawasan);
		Daerah Kabupaten Gresik;	
		2. Peraturan Bupati Gresik	2. Terbatasnya APIP yang
		Nomor 24 Tahun 2022	memiliki sertifikasi
		tentang Kedudukan ,	Pengawasan bidang tertentu
		Struktur Organisasi, Tugas,	(Investigasi, Teknik Sipil
		Fungsi dan Tata Kerja	dan IT);
		Inspektorat Kabupaten	
		Gresik;	
		3. Adanya Program Kerja	3. Terbatasnya kesempatan
		Pengawasan Tahunan	/ kuota APIP untuk
		(PKPT);	mengikuti Diklat/Bimtek,
			Workshop;
		4. Adanya Program dan	4. Belum optimalnya Sarana
		Kegiatan pemeriksaan	dan Prasarana untuk
		tertentu/khusus;	mendukung kebutuhan
			pengawasan.
		5. Adanya Kegiatan	5. Belum optimalnya jumlah
		Monitoring dan Evaluasi	Aparatur Pengawas sesuai
		pelaksanaan kebijakan	ANJAB ABK nya.
		Penyelenggara	
	\	Pemerintahan;	
Eslator I	Zl-u401	6. Adanya komitmen	
raktor	Eksternal	pimpinan dan staf untuk	
OPPRTUNITIES:	THREATS:	melakukan pengawasan. STRATEGI : SO	STRATEGI : WO
1. Adanya regulasi	Adanya krisis kepercayaan		1. Meningkatkan
pemerintah dan peran	masyarakat (Publik) terhadap		pemanfaatan sarana dan
masyarakat dalam rangka	independensi aparat	dengan dukungan peraturan	prasarana yang ada untuk
menciptakan tata kelola	pengawasan dan pemerintah	perundang- undangan dan	menjalankan tugas dan
pemerintahan yang baik dan	pada umumnya;	kebijakan pemerintah;	fungsi pengawasan;
bersih;	F	Januari P princing	P. P. J. Barrabarri
Adanya peraturan	2. Masih adanya paradigma	2. Meningkatkan	2. Melaksanakan
perundang-undangan yang	yang berkembang bahwa	kompetensi sumberdaya	diklat/bimtek bidang
mendukung peran Aparatur	pemeriksaan hanya mencari	Aparatur Pengawasan;	pengawasan secara
Pengawas melaksanakan	kesalahan dan berfungsi		mandiri (PKS);
pembinaan dan pengawasan;	sebagai pengawasan saja		
3. Adanya Diklat/Bimtek	(Watch dog).	3. Meningkatkan pembinaan	_
bidang pengawasan yang		dan pengawasan terhadap	bagi PNS di luar
diselenggarakan oleh oleh		proses pelaksanaan kegiatan	
Instansi/Lembaga Pemerintah.		pada SKPD dan Desa	APIP (Seleksi terbuka).
		dengan motede terbaru yaitu	
		Quality assurance dan	
		consulting.	
L	1		l .

D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Visi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2020 – 2024 adalah "terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi". Sedangkan pernyataan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dicanangkan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur Periode 2020-2024 dimana Inspektorat mengemban salah satu fokus program yaitu "Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, parsipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan. "Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan perluasan Zona Integritas WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi Inspektorat Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Adapun identifikasi fokus beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang dihadapi permasalahan Inspektorat Kabupaten Gresik terkait dengan telaahan atas Rencana Strategis Timur Inspektorat Provinsi Jawa adalah sebagai berikut

NI.	Sasaran Jangka	Permasalahan	Fa	ktor
No	Menengah Renstra K/L	Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	Hasil evaluasi dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur menunjukkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah Kabupaten Gresik berada pada level 2 sedangkan capaian BPKP pada akhir tahun 2020 agar kapabilitas APIP secara nasional ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan yang bersertifikasi bidang pengawasan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan kompetensi seluruh Aparatur Pengawasan melalui Diklat/Bimtek bidang pengawasan. Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.
2.	Meningkatnya indeks integritas Provinsi Jawa Timur	Pemahaman yang kurang tentang pentingnya SKPD menjadi wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Sedikit SKPD yang diusulkan menjadi Zona Integritas WBK dan WBBM serta sosialisasi dan pendampingan yang berkesinambungan belum optimal	Telah dilakukan pencanangan beberapa SKPD menjadi wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM. Adanya pengusulan dan perencanaan untuk mendorong terwujudnya pemahaman tentang pentingnya SKPD menjadi wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM.

E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2020 – 2024 adalah "Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan trusted Advisor pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan wakil presiden" Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Sedangkan Misi BPKP adalah melaksanakan misi presiden dan wakil presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan :

- Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;
- Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas, meliputi dua hal yaitu pengembangan sumber daya pengawasan pada internal BPKP dan pada APIP diluar BPKP.

Pada misi 2 BPKP memiliki kecenderungan sifat yang aktif yaitu BPKP melakukan peran pembangunan pengawasan untuk mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui implementasi SPIP pada unit-unit kerja pemerintah dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan yang berkesinambungan. Tabel berikut ini adalah identifikasi atas hal-hal yang terkait permasalahan yang dihadapi beserta faktor yang mempengaruhi berdasarkan telaahan Rencana Strategis BPKP.

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan		Faktor
110	Renstra K/L	SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan program prioritas pembangunan nasional	Pembekalan dan sosialisasi tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi kurang berkesinambungan. Satgas SPIP terintegrasi masing-masing SKPD baru mengenal metode yang baru (terintegrasi)	Keterbatasan SDM baik dari SKPD maupun Aparatur Pengawasan yang memiliki pengetahuan tentang SPIP Terintegrasi.	Adanya perencanaan yang baik dan berkesinambungan tentang implementasi tahapan-tahapan SPIP untuk dapatnya mencapai implementasi SPIP Terintegrasi yang efektif di masing-masing SKPD

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan		Faktor
	Renstra K/L	SKPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.	Hasil evaluasi dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur menunjukkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah Kabupaten Gresik berada pada level 2 sedangkan capaian BPKP pada akhir tahun 2020 agar kapabilitas APIP secara nasional ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Apartur Pengawasan yang bersertifikasi bidang pengawasan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan kompetensi seluruh Aparatur Pengawasan melalui Diklat/Bimtek bidang pengawasan. Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.

F. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Gresik, antara lain:

- a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempertahankan opini BPK tetap menjadi WTP;
- b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peran APIP sebagai *Quality Assurance* (Penjamin kualitas) dan consulting (konsultan) bukan sebagai watch dog (anjing pengawas) lagi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik;

- d) Implementasi Capaian aksi pencegahan korupsi melalui MCP KPK dan kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK melalui Inspektorat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- e) Adanya pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 2025;
- f) Implementasi SPIP Terintegrasi yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- g) Tindak lanjut Perpres No 2 tahun 2022 tentang Percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksaan pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa Inspektorat Daerah terlibat dalam hal Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) di Pemerintah daerah bersama BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri.
- g) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan jawa timur tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020-2024 dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan peran APIP yang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diukur dengan *internal audit capability model* (IACM) yang dikembangkan oleh *the institute* of internal audit (IIA).

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi

Tujuan organisasi mengandung makna:

- Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
- 2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi Pertama program kerja Kepala Daerah terpilih "Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif" dengan tujuan "Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance" serta sasaran "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi" maka Inspektorat Kabupaten Gresik menetapkan Tujuan organisasi sesuai dengan Sasaran yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik sesuai dengan yang diamanatkan. Sasaran urusan Inspektorat Pada RPJMD Kabupaten Gresik adalah

" Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi".

Penetapan Tujuan Organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Indikator tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik. yang dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu PMPRB yang dilaksanakan oleh tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dan Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh KEMENPAN RB	Penilaian Reformasi Birokrasi meliputi Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara, dan Aspek Reform) dan Komponen Hasil (Akuntabilitas Kinerja dan Kuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi).	69,4	71,2	74,62	77,34	80,42	84,77	88,6	88,6
Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai hasil dari assesment dan evaluasi terhadap tingkat kematangan Penerapan SPBE berupa level pada 4 domain utama	Rata-rata Nilai Domain SPBE (Kebijakan, Tata kelola,Manajemen dan Layanan)	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pengintegrasian tujuan, sasaran dan program kegiatan SKPD disajikan ke dalam tabel berikut:

NO	TIIIIAN	SASARAN	INDIKATOR	TARG	ET KINEF	RJA SASA	RAN PAI	DA TAHU	N KE-
NO	TUJUAN	SASAKAN	SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1		Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	daerah Kabupaten Gresik	Nilai Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
3		Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3	3	3	3

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi adalah strategi dan kebijakan Instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Instansi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Instansi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Gresik, maka diperlukan suatu tindakan untuk melakukan suatu kegiatan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya organisasi. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor yang berasal dari internal maupun eksternal akan menjadi penentu suatu organisasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat yang nantinya akan berpengaruh besar dalam meraih kesuksesan organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten Gresik disajikan sebagai berikut:

Faktor	Internal	STRENGTHS:	WEAKNESSES:
		1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;	kompetensi sebagian Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
		2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;	2. Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi Pengawasan bidang tertentu (Investigasi, Teknik Sipil dan IT);
		3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);	3. Terbatasnya kesempatan / kuota APIP untuk mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
		4. Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kebutuhan pengawasan.
		5. Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;	5. Belum optimalnya jumlah Aparatur Pengawas sesuai ANJAB ABK nya.
Faktor I	Eksternal	6. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.	
OPPRTUNITIES:	THREATS:	STRATEGI : SO	STRATEGI : WO
Adanya regulasi	1. Adanya krisis kepercayaan		1. Meningkatkan
pemerintah dan peran	masyarakat (Publik) terhadap		pemanfaatan sarana dan
masyarakat dalam rangka	independensi aparat	dengan dukungan peraturan	prasarana yang ada untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	pengawasan dan pemerintah pada umumnya;	perundang- undangan dan kebijakan pemerintah;	menjalankan tugas dan fungsi pengawasan;
Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;	Masih adanya paradigma yang berkembang bahwa pemeriksaan hanya mencari kesalahan dan berfungsi sebagai pengawasan saja	2. Meningkatkan kompetensi sumberdaya Aparatur Pengawasan;	Melaksanakan diklat/bimtek bidang pengawasan secara mandiri (PKS);
Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.	(Watch dog).	3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD dan Desa dengan motede terbaru yaitu <i>Quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .	bagi PNS di luar

Berdasarkan hasil identifikasi diatas maka Inspektorat Kabupaten Gresik mencanangkan strategi dan kebijakan jangka menengahnya sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program					
Pemerintah Kabupaten Gresik: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas	Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
Berdasarkan Good and Clean Governance		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan keuangan dan penyediaan gaji dan tunjangan yang berkualitas dan tepat waktu				
Inspektorat: Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan				
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan terhadap kapasitas sumber daya aparatur, kuantitas pelaksanaan Bimtek dan PKS serta Pelaksanaan diklat bidang pengawasan terkait peningkatan kompetensi APIP				
		Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai					
		Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
		Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan	
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraa n Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sinergitas pengawasan pemyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Program penyelenggaraan pengawasan
	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Meningkatkan kualitas Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan di implemetasi tahapan SPIP yang menyeluruh dan berkesinambungan Meningkatkan kualitas Pendampingan dan Asistensi pada implementasi Tahapan SPIP yang menyeluruh dan berkesinambungan	Peningkatan efektifitas pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gresik, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program kegiatan serta Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kelompok Sasaran

Program pembangunan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Tingkat keberhasilan program digambarkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi sasaran program yang bersangkutan. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program, kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD;
 - 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2. Pengadaan Mebel;
 - 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4. Pengadaan Aset tak Berwujud.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3. Pemeliharaan Mebel;
- 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 5. Pemeliharaan Aset tak Berwujud.
- 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran:

Inspektorat Kabupaten Gresik

- 2. Program Penyelenggaraan pengawasan, meliputi kegiatan:
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3. Reviu Laporan Kinerja;
 - 4. Reviu Laporan Keuangan;
 - 5. Pengawasan Desa;
 - 6. Kerjasama Pengawasan Internal;
 - 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, meliputi kegiatan
 - 1. Penanganan Penyelesaian Kerugiaan Negara/Daerah;
 - 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Kelompok Sasaran:

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, meliputi kegiatan :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan :

- 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- b) Pendampingan dan Asistensi, meliputi sub kegiatan:
 - 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Kelompok Sasaran:

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Gresik, secara terinci sebagaimana pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik telah ditetapkan dan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Gresik serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1. Level kapabilitas APIP;
- Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi;
- 3. Nilai rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD;
- 4. Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik.

Rincian Indikator Kinerja, tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada RPJMD, sebagaimana pada tabel berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DIKATOR TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE									
INO	TOJOAN	SASAKAN	KINERJA	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
1	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	69,4	71,2	74,62	77,34	80,42	84,77	88,6			

NO	CACADAN	INDIKATOR	TAR	GET KINE	RJA SASA	RAN PAD	A TAHUN	KE-
NO	SASARAN	SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4
2	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kabupaten Gresik	Nilai Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	82	82,5	83	83,5	84	84,5
3	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3	3	3	3

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TAR	GET KINE	RJA PROG	RAM PAC	A TAHUN	I KE-
NO	PROGRAM	PROGRAM	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Program	Persentase tindak lanjut audit eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan pada lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 maka arah perkembangan organisasi telah diatur untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui peran aktif semua *stakeholders*. Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama periode Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Gresik pada umumnya.

Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis namun masih terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Mengingat hal tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama periode Renstra apabila diperlukan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2027. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut meskipun Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik telah habis masa berlakunya sedangkan kewajiban menyusun Renja Tahun 2027 tetap harus dilakukan sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA PPAS yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027.

Gresik, 27 Desember 2023

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., MT.

Pembina Tingkat I NIP. 19740101 199803 1 013

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

				1	irget							Urusan/Bidang Urusan/Perangkat		Indikator 2021-2022					2021		2022		2023		2024		2025		2026
Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Formulasi	Baseli ne 202	1 2022	023 2024	2025						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Indikator 2023-2026		Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	Target				Target		Target					
1		3	4 5	6	7 8	9		10 1:	1 12	13	14 15	16	17	18		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
								6 1				UNSUR PENGAWASAN URUSAN																	
				\pm				6 1	0	0		INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT							10.055.100.762		17.171.176.754		17.729.914.557		18.300.360.238		18.849.371.046		19.414.852.177
Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level kapabilitas APIP	level kapabilitas APIP yang di nilai BPKP	2 3	3	3 3	4	Program	6 0:	1 1			PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	Persenta	(jumlah sasaran program OPD yang terlaksana / jumlah total sasaran program OPD) x 100%	100%	100%	7.845.663.494	100%	10.775.442.190	100%	11.807.549.557	100%	11.959.465.232	100%	12.322.749.189	100%	12.696.931.665
														Jumlah Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah (Buku)	Buku			24	99.998.240	24	111.000.000								
							Kegiatan	6 0:	1 01	2 (01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen							7	114.330.000	7	216.965.975	7	223.474.954	7	230.179.203
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 1	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang di Cetak (Buku) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Buku		30	24	24.999.804	24	27.750.000		28.582.500	1	29.439.975	1	30.323.174	1	31.232.869
				+				-	+	\vdash	_	T Clarigeous Doctor	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan	Daerah Jumlah Laporan yang di Cetak (Buku)	Buku		30	24	9.999.717	24	11.100.000	-	20.362.300	-	29.439.973	-	30.323.174	-	31.232.009
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 (000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen							1	11.433.000	1	27.813.000	1	28.647.390	1	29.506.812
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 4	1 000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan yang di Cetak (Buku) Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	Buku		30	24	9.999.717	24	11.100.000								
							Jub Kegatan		. 01	ו [*] ו	000	Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen							1	11.433.000	1	26.520.000	1	27.315.600	1	28.135.068
				Ħ			Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 (000	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Laporan yang di Cetak (Buku) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Buku Dokumen		30	24	9.999.717	24	11.100.000	1	11.433.000	1	26.520.000	1	27.315.600	1	28.135.068
								\vdash		\vdash	+		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-	SKPD Jumlah Laporan yang di Cetak (Buku)	Buku		30	24	9.999.717	24	11.100.000								
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 1	01 000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen							1	11.433.000	1	26.520.000	1	27.315.600	1	28.135.068
				\vdash								Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporar	Jumlah Laporan vang di Cetak (Buku) Jumlah Laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar	Buku		25	24	9.999.717	24	11.100.000								
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 (000	5 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumian Laporan Capaian Kinerja dan ikmisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan							4	11.433.000	4	32.701.000	4	33.682.030	4	34.692.491
							Sub Kegiatan	6 0	1 01	2 1	1 000	Fvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat		Buku		12	24	24.999.851	24	27.750.000								
				\perp						- 1	-	Litation Charles of Charles	Daerah	Daerah	Laporan							4	28.582.500	4	47.452.000	4	48.875.560	4	50.341.827
							Kegiatan	6 0:	1 01	2 1	12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) Jumlah Jenis Langran Dokumen Administrasi	Bulan			12	5.871.459.833	12	6.476.768.500	3	7.702.570.875	3	7.941.425.597	3	8.198.306.082	3	8.463.237.972
														Keuangan Perangkat Daerah	laporan							3	7.702.570.875	3	7.941.425.597	3	8.198.306.082	3	8.463.237.972
							Sub Kegiatan		, ,,	2 0	,, ,,,,,	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	Bulan		12	12	5.858.960.000	12	6.444.856.000								
							300 Kegiatan	6 0.	. 01		2 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang							47	7.669.701.000	47	7.907.569.626	47	8.163.434.431	47	8.427.320.172
				+									Tersedianya Laporan Keuangan	Jumlah Laporan vang di Cetak (Buku)	Buku		24	24	7.499.883	24	20.812.500								
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 (000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan 7 Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dar Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan							12	21.436.875	12	22.079.981	12	22.742.381	12	23.424.652
				\Box			Sub Kegiatan	6 0	1 01	2 1	2 000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proposis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Relanoran dan Analisis	Buku		24	24	4.999.950	24	11.100.000								
				\vdash				J	1	<u> </u>	250	Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen							12	11.433.000	12	11.775.990	12	12.129.270	12	12.493.148
					_	Ш	Kegiatan	6 0:	1 01	2 1	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		rengawasan	Orang			26	399.999.970	26	1.276.418.970								
				\Box	\perp							oraci dil		Jumlah Pendidikan dan Latihan yang diikuti	Diklat							3	955.842.000	3	974.958.840	3	994.458.017	3	1.014.347.177
				\Box										Jumlah APIP yang Mengikuti Diklat	Orang Orang		24	20	399.999.970	26 20	1.276.418.970								
					\pm		Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri	Kali Kali		55 55	75 27		80 30									
				$ \top $										Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Orang							3	955842000	3	974958840	3	994458016,8	3	1014347177
				++										Pelatihan	Jenis			6	599.482.447	6	1.057.841.100	-		-		_			
				\Box			Kegiatan	6 0:	1 01	2 0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Laporan Dokumen Administrasi	Jenis Jenis Japoran				333.402.447			7	1.339.650.914	7	1.590.554.140	7	1.638.270.764	7	1.687.418.887
							Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor vang Disediakan	Paket		0		0	0	0	50	119.732.914	50	226.897.000	50	233.703.910	50	240.715.027
				\Box		\vdash	Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 (000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang			0	0	0	0	0								
				\vdash		\vdash	- "			\vdash	+		,	Disediakan Jumlah Jenis Mamin	Paket Jenis			6	99.973.170	6	127.650.000	6	357.000.000	6	457.851.600	6	471.587.148	6	485.734.762
				\top			Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Mamin Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket						227.030.000	6	180.782.000	6	186.205.460	6	191.791.624	6	197.545.373
				\vdash			Sub Kegiatan	6 0	1 01	2 .	06 nnn	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan dan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	Jenis		12	12	44.979.910	12	73.260.000								
				\perp		\sqcup	megandii		_ u	L-1,	- 000	Penggandaan	Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				34.999.930		EE E00 000	12	46.360.000	12	47.750.800	12	49.183.324	12	50.658.824
				\parallel	†		Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 1	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Media yang Berlangganan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis Dokumen		4	9	34.999.930	9	55.500.000	6	54.215.000	6	55.841.450	6	57.516.694	6	59.242.194
				\Box								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terfasilitasi	Kali		300	250	350.000.000	250	634.931.100								
						\Box	Sub Kegiatan	6 0:	1 01	2 (000	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan							250	424.396.000	250	437.127.880	250	450.241.716	250	463.748.968
				\Box	\pm		Cole Maniat	6 0:	1 01		vc 00-		Terlaksananya Penatausahaan Arsip	Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Arsio yang Tertata	Dokumen		Baru	1000	44.983.737	1000	111.000.000								
							Sub Kegiatan	6 0:	01	2 1	ю 001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen							1000	100.000.000	1000	120.000.000	1000	123.600.000	1000	127.308.000
				+		+	Sub Kegiatan		, ,	Ι, Γ.	16 no+	Dukungan Pelaksanaan Sistem 1 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	Aplikasi		Baru	1	24.545.700	1	55.500.000	\vdash							
							regardi		01	ĽĽ	.5 001	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen							1	57.165.000	1	58.879.950	1	60.646.349	1	62.465.739

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

						Tai	rget								House (Biden House (Becombet		Indikator 2021-2022					2021		2022		2022		2024		2025		2026
Sasaran Renstra	Indikat	tor Kinerja	Formulasi	Baseli		2022 20									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF	Kinerja	Indikator 2021-2022		Formulasi	Baseline		Rp Rp		Rp		Rp	Target	Rp	Target	Rp		Rp
				ne	2021	2022 20	023 202	24 2025							BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAF		Indikator 2023-2026	Satuan	Penghitungan	2020	larget		Target		Target		Target		Target		larget	кр
1							7 8				0 11	12	13	14 1	.5 16	17	18				22						28		30			33
														+		Kanto	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan															
									Kegiat	an (5 01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kantor	Jenis			7	367.221.808	7	1.097.530.260								
															Jurial Pemer	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit							57	760.922.168	50	277.538.200	50	285.864.346	50	294.440.276	
															Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional	Unit		0	1	25.000.000	2	487.030.260								
									Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	07 00	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Unit							7	501 641 168	0	0	0	0	0	0
	-	_		_	\vdash	-	+	+	Cub Vani		. 01	01	1	07 00	105 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	Jenis		Baru	5	39.947.083	5	111.000.000	-				-		-	
									- 300 Kegi	iataii i	01	01	-	07 00	03 Pengadaan Medel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	Paket							7	70.540.000	7	72.656.200	7	74.835.886	7	77.080.963
					\vdash	_	_		Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	07 00	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis		7	7	269.943.188	7	388.500.000								
					Ш					_			\perp	_			vang Disediakan	Unit				32.331.537	2	111.000.000	43	188.741.000	43	204.882.000	43	211.028.460	43	217.359.314
					\Box				Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	07 00	08 Pengadaan Aset tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Jenis Pengadaan Aplikasi Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang	Jenis Unit		Baru	2	32.331.537	-	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	_				\vdash	_	+	+			+						Disediakan Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang	Orang			10	313.880.000	10	370.296.000	_		_		-		-	-
	-				\vdash	_	-	-	Kegiat	an (5 01	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terbayarkan (Orang) Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Jasa	Jenis			10	313.000.000	10	370.296.000	3	267.137.600	3		3	268.611.380	3	269.381.593
	-	-			\vdash	-	-	+		-	+						Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan Surat		212	390	17.600.000	390	33.300.000	3	267.137.600	3	267.863.600	3	268.611.380	3	269.381.593
									Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	08 00	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan							2	13.700.000	2	14.111.000	2	14.534.330	2	14.970.360
					\vdash			_		\pm	+		\vdash				Jumlah Pembayaran Internet Servis Provider	Bulan		Baru	12	22.680.000	12	33.300.000								
				+		+	+	+	Sub Kegi	iatan	01	01	2	08 00	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Day Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Bulan) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.				\vdash		\vdash		\vdash						\vdash	
							\perp				\perp						Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan							2	10.500.000	2	10.815.000	2	11.139.450	2	11.473.634
							T			T	Т		\Box	08 0004	Demonstrate Lang C		Jumlah Tenaga Honorer Lepas yang Terbayarkan (Orang)	Orang		10	10	273.600.000	10	303.696.000								
									Sub Kegi	iatan	01	01	2		04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Lanoran							8	242.937.600	8	242.937.600	8	242.937.600	8	242.937.600
	-			+	\vdash	\perp	+	-		_							Umum Kantor yang Disediakan										-				-	2.2.27.000
	_						_		Kegiat	an (5 01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara (Unit)	Unit			100	193.621.196	100	385.587.360								
				1	Ш		\perp								,		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah vang dipelihara	Unit							171	667.096.000	171	690.158.880	171	713.763.646	171	737.926.556
									l		١				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paiak Kendaraan	Jumlah Kendaran Eselon II yang Terpelihara (Unit)	Unit		Baru	1	51.598.825	1	55.500.000								
									Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	09 00	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit							1	102.096.000	1	105.158.880	1	108.313.646	1	111.563.056
					\vdash	-	+				+		\vdash		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya	dan dibayarkan Paiaknya Jumlah Kendaraan Operasional yang				16	107.624.875	16	277.500.000								
	-				\vdash	_	-		Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	09 00	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Terpelihara (unit) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit		16	16	107.624.875	16	277.500.000								
															Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit							16	386.183.000	16	397.768.490	16	409.701.545	16	421.992.591
									Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	09 00	105 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mebel	Jenis		Baru	5	9.974.371	5	11.100.000	55	11.433.000	55	11.775.990		12.129.270	**	12.493.148
										\top	\top		\Box			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan Kantor yang Ternelihara	Unit		100	100	19.923.125	100	27.750.000	- 55	11.455.000	- 33	11.773.990	- 33	12.129.270	33	12.495.140
					\vdash	-		_	Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	09 00	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit							98	102.384.000	98	105.455.520	98	108.619.186	98	111.877.761
									Cub Vani		. 01	01		00 00	108 Pemeliharaan Aset tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak	Dipelihara Jumlah Aplikasi yang Terpelihara	Aplikasi		Baru	2	4.500.000	2	13.737.360								
							_		300 Kegi	atali (01	01		09 00		Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Aset			0	0	0		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
					П				Sub Kegi	iatan (5 01	01	2	09 00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			ваги					1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
															Lainnya	Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit							1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000
																			(jumlah rekomendasi audit	e					4 1							
											6 01	2					Persentase tindak lanjut audit internal	Persenta	yang di tindaklankjuti / jumlah total	100%	100%		100%	_	100%		100%		100%		100%	
																		se	jumlah total rekomendasi) x													
		0	Jumlah	79%	100%	100% 10	100	100%	%	\vdash		Н							100% (jumlah													
		ase Tindak r	ekomendasi yang ndaklanjuti telah							6									rekomendasi audit	ıt												
	Audit Int		erstatus telah elesai /Jumlah								6	6 01	2					Persentase tindak lanjut audit eksternal	Persenta se	yang di tindaklankjuti / jumlah total	74,57%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
akuntabilitas	Sesuai		eluruh ekomendasi) x 100																rekomendasi) x													
keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	REKOIIIE	9	6	′⊢	\Box				Progra	ım					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				(jumlah			1.219.126.461		3.385.650.394		2.992.869.000		3.082.655.070		3.175.134.722		3.270.388.764
Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	1																		pengaduan masyarakat yang													
				100%	100%	100% 10	100	100%	6		6 01	2					Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	Persenta se	di tindak lanjuti / jumlah Pengaduan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
																			masyarakat yang													
	-			+	\vdash	_	+	+											masuk) x 100%													
	Rata-rata	a kategori J	umlah nilai SAKIP																(jumlah OPD hasil evaluasi SAKIP													
	hasil Eva		OPD / Jumlah OPD	81,65	82	82,50 8	83,	,5 84			6 01	2					Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	Persenta se	dengan nilai A / jumlah OPD yang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
																			dievaluasi) x 100%													
					П												Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah (LHP)	LHP			15	1.118.126.601	15	3.152.385.448								
					П												Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan	Laporan							7		7		7		7	
					П												Pengawasan Internal Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan	Laporan							1		1		1		1	
				1	\Box		+	+									Pengawasan Eksternal Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan	Level							3		4		4		4	
					\vdash	+	+	+	Kegiat	an (5 01	02	2 0	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Internal Pemerintah Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit	Level							1	2.603.059.000	2	2.681.150.770	3	2.761.585.293	4	2.844.432.852
				+	\vdash		+	+									Infrastruktur SPBE Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit	Level							1 1		2		3		4	2.3
		-		+			+	+	-								Aolikasi SPBE Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit	Level									2	-	3		4	
				+	\vdash		+	+	+								Keamanan SPBE Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi										-			-		-
										\perp							ARG dan PPRG	Laporan							1		1		1		1	

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

					Targe	et .							Urusan/Bidane Urusan/Peranekat		Indikator 2021-2022					2021		2022		2023		2024		2025		2026
Sasaran Renstra	Indikator Kind	nerja Formulasi	Baseli ne 2	2021 2	1022 2023	2024	2025						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Indikator 2023-2026		Formulasi Penghitungan	Baseline 2020	Target		Target		Target		Target				Target	Rp
1		3	4	5	6 7	8	9		10	1 12	13	14 1	15 16	17	18		20	21	22		24		26		28		30		32	33
							s	Sub Kegiatar	6	02	2	01 00	001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Daerah (LHP) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	LHP		13	21	132.743.830	21	487.394.118	35	864.314.000	35	890.243.420	35	916.950.723	35	944.459.244
							s	Sub Kegiatar	6	1 02	2	01 00	002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan	Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Daerah (LHP)	LHP		55	15	331.859.880	15	842.251.350							-	
				-				Sub Kegiatar		01 02	2	_	203 Reviu Laporan Kineria		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja (LHP)	Laporan		15	13	66.371.936	13	162.160.000	35	374.635.000	35	385.874.050	35	397.450.272	35	409.373.780
				+			-			+				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan (LHP)	Laporan		45	31	179.396.170	31	256.523.220	22	289.385.000	22	298.066.550	22	307.008.547	22	316.218.803
							s	Sub Kegiatar	6	02	2	01 00	004 Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan							60	486.651.000	60	501.250.530	60	516.288.046	60	531.776.687
				+			s	Sub Kegiatar	6	01 02	2	01 00	005 Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (LHP) Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Kerja Sama	LHP		15	8	66.371.820	8	290.725.650	12	249.892.000	12	257.388.760	12	265.110.423	12	273.063.735
							s	Sub Kegiatar	6	01 02	2	01 00	006 Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumian Laporan Hasii Kerja Sama Pengawasan Internal (Dokumen LHP) Jumiah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	LHP		Baru	2	164.820.965	2	555.000.000	1	22.828.000	1	23.512.840	1	24.218.225	1	24.944.772
				1						1			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev TLHP temuan BPK dan APIP (LHP)	LHP		30	2	176.562.000	2	558.331.110								
					\perp		5	Sub Kegiatan	6	01 02	2	01 0	007 Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumer							2	315.354.000	2	324.814.620	2	334.559.059	2	344.595.830
								Kegiatan	6	01 02	2	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (LHP) Jumlah Jenis Laporan Penyelenggaraan	LHP			8	100.999.860	8	233.264.946	2	389.810.000	2	401.504.300	2	413.549.429	2	425.955.912
				+									201 Penanganan Penyelesaian Kerugiaan	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah (LHP)	LAPOTAN		Baru	4	50.499.930	4	116.632.473	2	389.810.000	2	401.304.300	2	413,343,423	2	423.533.512
				#			S	Sub Kegiatar	6	02	2	UZ 00	Negara/Daerah	Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan							12	166.500.000	12	171.495.000	12	176.639.850	12	181.939.046
							s	Sub Kegiatar	6	01 02	2	02 00	2022 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan	LHP		31	8	50.499.930	8	116.632.473	12	223.310.000	12	230.009.300	12	236.909.579	12	244.016.866
Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas	Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP	3	3	3 3	3	3	Program	6	11 3			PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Tuluan Tertentu Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi		(Jumlah OPD yang telah di evaluasi SPIP / jumlah OPD x 100 %	100%	100%	990.310.807	100%	3.010.084.170	100%	2.929.496.000	100%	3.258.239.936	100%	3.351.487.134	100%	3.447.531.748
								Kegiatan	6	1 03	2	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang		Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan	SOP			10	98.999.786	10	333.000.000								
									6 01 0				Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Jenis Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasnya yang Disusun	Rekomer dasi							2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
				+			s	Sub Kegiatar	6	1 03	2	01 00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Terselesaikan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di	SOP		Baru	10	49.499.893	10	166.500.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000
								Suh Kepiatan		11 03	,	01 00	2002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang	Bidang Pengawasan yang Disusun Jumlah SOP / Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Terselesaikan	SOP		Baru	10	49.499.893	10	166.500.000								
				4									Fasilitasi Pengawasan	Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi.	Rekomer dasi							2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000
				4											Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencesahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	Laporan			12	891.311.021	12	2.677.084.170								
				+			_	Kegiatan	6	1 03	2	02	Pendampingan dan Asistensi		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Pelayanan yang memperoleh	OPD							47	2.779.496.000	47	3.108.239.936	47	3.201.487.134	47	3.297.531.748
				+											Predikat WBK/WBBM Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan	pelayana n		Baru	12	396.999.708	12	600.000.000	2		2		2		2	
				+	+		s	Sub Kegiatar	6	03	2	02 00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi UrusanPemerintahan Daerah	Asistensi Pengawalan OPD Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan	Laporan		Baru	12	396.399.708	12	000.000.000	47	904.362.000	47	931.492.860	47	959.437.646	47	988.220.775
			++	+	+	\vdash	+		\forall	+	H	+			Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	Laporan		48	1	27.999.913	1	333.000.000					"		-	
							s	Sub Kegiatar	6	01 03	2	02 00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	OPD							47	227.362.000	47	234.182.860	47	241.208.346	47	248.444.596
								Sub Kegiatar		11 02		02 ~	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan	Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan		12	12	438.311.487	12	1.411.084.170								
							3	AND NEGISTRE				JZ UL	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Kegiatan							12	1.296.232.000	12	1.580.478.016	12	1.627.892.357	12	1.676.729.127
				1			s	Sub Kegiatar	6	01 03	2	02 00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan	Laporan		Baru	1	27.999.913	1	333.000.000								
															Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD							47	351.540.000	47	362.086.200	47	372.948.786	47	384.137.250